

## TAJUK RENCANA

### Gejala 'Bencana' PHK

**MASALAH** pemutusan hubungan kerja (PHK) setelah melanda PT Sri Rejeki Isman (Sritex) Tbk, terasa akan diikuti sejumlah perusahaan lain yang mengalami nasib serupa, yakni bangkrut atau pailit. Setidaknya, dalam beberapa hari terakhir muncul pemberitaan di berbagai media mengenai tanda-tanda PHK yang dilakukan sejumlah perusahaan. Bahkan selain PT Sritex juga ada sejumlah perusahaan yang telah melakukan PHK karyawan. Di antaranya dua perusahaan sepatu di Tangerang yang mem-PHK sekitar 3.500 karyawan.

Kondisi tersebut mestinya direpson cepat oleh pemerintah, mengingat PHK terjadi di perusahaan-perusahaan yang selama ini menjadi sumber harapan masyarakat, terkait ketenagakerjaan. Apalagi, sejumlah perusahaan yang akhir-akhir ini telah menunjukkan gejala-gejala 'bencana' PHK.

Selain menjadi mampu membuka peluang kerja, selama ini sejumlah perusahaan juga punya andil besar terhadap perekonomian dan pendapatan asli daerah (PAD), khususnya dari sektor pajak. Hal itu seperti diakui Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo, bahwa PT Sritex punya andil sangat besar terhadap daerah.

Seperti diungkapkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Sukoharjo, Richard Tri Handoko, PT Sritex ikut memberikan kontribusi kepada Pemkab Sukoharjo. Melalui Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) saja, PT Sritex berkontribusi sekitar Rp 1 miliar perbulan. Tentunya angka tersebut cukup besar untuk daerah. Selain itu, keberadaan PT Sritex di Sukoharjo juga telah berdampak langsung terhadap roda perekonomian masyarakat sekitar pabrik.

Melihat kontribusi perusahaan tekstil seperti PT Sritex dan perusahaan

sepatu di Tangerang, sudah se-layaknya kalau upaya-upaya penyelamatan perusahaan yang telah menunjukkan gejala 'bencana' PHK memang sangat diperlukan.

Berkaitan kondisi sejumlah perusahaan yang menunjukkan gejala-gejala 'bencana' PHK, pemerintah dan pihak-pihak terkait seperti tim kurator juga telah menunjukkan harapan akan munculnya titik terang. Seperti dikatakan Menteri Tenaga Kerja RI Yassierli, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen melindungi pekerja dan hak-haknya.

Di sisi lain, juga ada tim kurator yang bergerak cepat melakukan langkah-langkah konkret. Seperti kuratur PT Sritex mengklaim telah mengeluarkan Rp 35,03 miliar untuk bayar gaji karyawan PT Sritex sejak 31 Januari hingga 14 Februari lalu. Selain itu, kurator juga telah memfasilitasi pengurusan Jaminan Hari Tua (JHT) dari BPJS Ketenagakerjaan.

Alangkah baiknya kalau pernyataan pemerintah dan kurator tidak hanya sekadar janji manis. Sebaliknya, penyelamatan perusahaan ber-gejala bencana PHK mutlak harus dilakukan. Demikian juga pemerintah daerah yang selama ini mendapatkan tumpahan 'madu' pajak dari perusahaan, seperti dirasakan Pemkab Sukoharjo.

Mestinya, pemerintah daerah tidak hanya terampil menerima pajak dari perusahaan, tetapi juga harus ikut menyelamatkan aset-aset perusahaan yang dikenai pajak, seperti tanah, bangunan, mesin, dan kendaraan milik perusahaan tersebut.

Dengan adanya kesadaran dan tanggungjawab dari berbagai pihak berkompeten, mestinya permasalahan PHK bisa benar-benar dapat dituntaskan. Tidak sekadar janji-janji dan pencitraan politis. Juga jangan sampai gejala bencana PHK malah dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. □ - f

## 'Sunset Industry'



### Timothy Apriyanto

**PADA** suatu pagi, saya berkeliling mencari lapak penjual koran di Kota Yogyakarta, dan tidak menemukannya lagi satupun di tempat-tempat yang dulu sepuluh tahun lalu selalu menyajikan berbagai produk media cetak, termasuk surat kabar. Mendapatkan koran cetak saat ini selain dari berlangganan juga bisa dari pedagang asongan yang itu pun jumlahnya sangat sedikit di beberapa perempatan.

Peristiwa pagi itu lantas memberi inspirasi setelah saya konfirmasi dengan kawan saya di surat kabar *Kedaulatan Rakyat*, koran terbesar di DIY dan tertua di Indonesia.

Fenomena 'Sunset Industry' menggambarkan industri yang mengalami penurunan akibat perubahan teknologi, pasar, ketenagakerjaan, maupun pola konsumsi masyarakat. Efek fenomena 'Sunset Industry' ini lebih cepat terjadi karena terdorong disrupsi teknologi digital dan kecerdasan buatan yang mengubah lanskap industri di seluruh dunia.

Indonesia pernah mendapatkan efek positif berupa kesempatan dari fenomena 'Sunset Industry' khususnya karena dampak deindustrialisasi Tekstil / Produk Tekstil di Korea dan Tiongkok akibat naiknya biaya pekerja saat itu di tahun 1984. Namun saat ini, gejala deindustrialisasi dan tekanan terhadap industri tradisional, seperti industri percetakan termasuk industri surat kabar, semakin buruk.

Menurunnya industri surat kabar secara masif adalah salah satu contoh nyata dampak 'disruptive innovation'. Data dari Serikat Perusahaan Pers (SPS) mencatat, jumlah media cetak menurun dari 593 pada 2021 menjadi 399 pada 2022, sementara tiras media cetak turun dari 7,5 juta eksemplar pada 2021 menjadi 5 juta eksemplar pada 2022.

Platform digital yang lebih murah, mudah diakses, dinamis, dan adaptif, telah menggantikan surat kabar cetak. Clayton M. Christensen melalui konsep *Disruptive Innovation* dalam artikelnya "What Is Disruptive Innovation?" (2015) menyebut fenomena ini sebagai bagian dari karakteristik *disruptive innovation*, di mana teknologi baru

menawarkan solusi yang lebih sederhana dan terjangkau, mendisrupsi model bisnis tradisional.

Peter Drucker, melalui "The Age of Discontinuity" (1969), menyampaikan bahwa "Old industries decline not because they are inefficient, but because they are obsolete in the context of new knowledge and innovation."

Drucker menunjukkan bahwa inovasi menjadi katalis perubahan, menggantikan industri tradisional yang tidak lagi relevan.



KR-JOKO SANTOSO

Senada dengan Peter Drucker, Daniel Bell dalam bukunya "The Coming of Post-Industrial Society" (1973) menggambarkan pergeseran ekonomi akan terjadi dari industri produk massal menuju industri jasa dan informasi. Ia menegaskan: "Industrial society is superseded by a post-industrial society, where knowledge and services dominate over goods production." Teori ini relevan dalam menjelaskan bagaimana sektor manufaktur dan industri tradisional mulai tergantikan oleh sektor teknologi dan jasa.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDB menurun dari 21,08% pada 2016 menjadi 18,67% pada kuartal pertama 2023. Ini menunjukkan pergeseran struktur ekonomi Indonesia ke arah sektor jasa dan teknologi, sesuai dengan teori Bell dan Christensen.

Prof. Rhenald Kasali dalam bukunya "Disruption" (2017) menggarisbawahi

bahwa disrupsi adalah fenomena penghancuran model bisnis lama oleh teknologi baru. "Disrupsi adalah titik balik yang memaksa industri untuk meninggalkan cara lama dan menciptakan cara baru yang lebih efisien." Hal ini menjelaskan mengapa industri seperti surat kabar menghadapi penurunan tajam di era digital.

Dampak sosial dan ekonomi 'Sunset Industry' sangat beragam dengan skala paparan dampak yang berbeda. Salah satu dampak tersebut adalah penurunan industri pengolahan dan surat kabar yang memicu fenomena kehilangan pekerjaan dalam skala besar. Tenaga kerja harus beradaptasi dengan kebutuhan ekonomi digital, yang sering kali memerlukan keterampilan baru.

Meski 'disruptive innovation' menawarkan efisiensi, transformasi ini juga memunculkan tantangan besar, yaitu paradoks keberlanjutan dalam disrupsi digital. Perubahan cepat dapat menciptakan ketidakstabilan sosial dan ekonomi jika pemerintah dan pelaku industri tidak mampu mengikuti laju perubahan.

Indonesia dapat mengantisipasi dampak buruk 'Sunset Industry' melalui langkah-langkah strategis seperti pengembangan sektor digital yang inklusif dan berkelanjutan, *up-scaling & re-scaling 'human capital'*, transformasi digital, serta diversifikasi industri. (\*)-d

\*)**Timothy Apriyanto**, pengurus Kadin DIY, Wakil Ketua Apindo DIY Bidang Ketenagakerjaan, Wakil Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia DIY Bidang Organisasi dan Sekretaris Dewan Pendidikan DIY, dan Perwakilan Pengusaha Dewan Pengupahan DIY.

### Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas dan foto diri. Terimakasih.

## Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers)

No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.  
Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta,  
Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Komisaris Utama:** Imam Satriyadi, SH.

**Komisaris:** Mohammad Wirmon Samawi, SE., MIB.

**Direktur Utama:** Drs. H.Mohammad Idham Samawi.

**Direktur Keuangan:** Yuriya Nugroho Samawi, SE., MM., MS.

**Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE.

**Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo SSoS.

**Direktur Litbang, Pengawasan & Bisnis:** Yoeke Indra Agung Laksana, SE  
**Direktur Umum:** Ir. Dyah Sardjuningrum Sitawati.

**Pemimpin Umum:** Drs. H. Mohammad Idham Samawi. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Dr Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Dr Ronny Sugiantoro, MM,CHE. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSoS, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSoS, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafis:** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

**Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)  
**Manajer Iklan:** Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklanrkyk23@yahoo.com, iklanrkyk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris. maks. 10 baris). Rp 12.000,00 /baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

**Alamat Kantor Utama dan Redaksi:** Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

**Alamat Percetakan:** Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

**Alamat Homepage:** http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio:** KR Radio 107.2 FM

**Bank:** Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

**Perwakilan dan Biro:**

**Jakarta:** Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani.

Wartawan : H Ishaq Zubaeda Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.

**Semarang:** Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP.

**Banyumas:** Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil : Driyanto.

**Klaten:** Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiti.

**Kulonprogo:** Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Muslikhah. Wakil : Asrul Sani.

**Gunungkidul:** Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP.

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan -  
Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.

## 'Esuk Dhele, Sore Tempe'



### Prasetiyo

**BAGI** masyarakat Jawa, tentu tidak asing dengan *paribasan: Esuk dhele, sore tempe*. Peribahasa ini menggambarkan sikap yang tidak konsisten atau berubah-ubah

dalam waktu singkat. Senada dengan itu, ada *paribasan: Padune kaya welut dilengani*, yang memiliki makna seseorang yang sulit dipegang kata-katanya, sehingga merugikan kredibilitas di mata publik.

Fenomena tidak konsisten dalam berucap atau mengambil kebijakan ini sering kali terlihat dalam komunikasi publik yang dilakukan oleh pemerintah belakangan ini. Akibatnya, masyarakat kehilangan kepercayaan. Sesungguhnya, komunikasi publik adalah kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Pakar komunikasi politik asal Amerika Serikat, Robert E. Denton Jr., menyebutkan bahwa "Public communication is about engaging and informing citizens in ways that are clear, consistent, and trustworthy." Dengan kata lain, komunikasi publik yang efektif haruslah jelas, konsisten, dan dapat dipercaya agar masyarakat merasa terlibat serta memahami kebijakan yang diterapkan.

Namun, dalam realitasnya, keterbukaan informasi dan pola komunikasi pemerintah dalam menyampaikan kebijakan saat ini masih menjadi sorotan. Beberapa contoh yang menunjukkan tarik-ulur kebijakan (*yoyo policy*) adalah rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen awal tahun 2025 ini, yang akhirnya dibatalkan. Kemudian aturan baru mengenai gas LPG 3 kg yang direvisi setelah muncul gelombang penolakan dari masyarakat. Hal ini menunjukkan kurangnya sosialisasi yang matang sebelum kebijakan diterapkan.

Sebuah hasil survei menunjukkan : Apakah kebijakan pemerintah sudah re-sosialisasikan dengan baik? 68,8 % re-

sponden menjawab belum, selebihnya 30,9 persen menjawab sudah tersosialisasikan dengan baik, dan 0,3 persen menjawab tidak tahu

Kemudian ketika diajukan pertanyaan, apakah cara pemerintah berkomunikasi kepada publik dalam menyosialisasikan kebijakan/aturan/program akan memengaruhi citra dan penilaian kinerjanya di mata publik? 38 persen responden menjawab sangat memengaruhi, selebihnya 49,3 % menjawab memengaruhi, 10 persen menjawab tidak memengaruhi, 2,3 persen menjawab sangat tidak memengaruhi, dan menjawab tidak tahu 0,4 persen.

Terkait hal itu, di era digital seperti sekarang, media sosial memiliki dampak yang sangat besar dalam membentuk persepsi masyarakat. Karena itu, pejabat publik harus berhati-hati dalam berucap, bertindak dan mengambil kebijakan. Jangan sampai "esuk dhele sore tempe" seperti dalam judul tulisan ini.

Agar komunikasi publik pemerintah lebih efektif dan membangun kepercayaan masyarakat, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan:

Pertama, konsistensi dalam kebijakan. Dalam hal ini, pemerintah harus menghindari perubahan kebijakan yang mendadak dan memastikan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan kajian matang serta konsultasi dengan berbagai pihak.

Kedua, transparansi dan keterbukaan. Bahwa pemerintah harus terbuka dalam menyampaikan informasi terkait kebijakan yang akan diterapkan, termasuk dampak serta alasan di balik kebijakan tersebut.

Ketiga, sosialisasi yang optimal. Sebelum suatu kebijakan diterapkan, ma-

sarakat harus diberi pemahaman yang cukup melalui berbagai kanal komunikasi, termasuk media sosial, diskusi publik, dan edukasi langsung.

Keempat, keteladanan dari pejabat publik. Sesungguhnya, masyarakat tidak hanya menginginkan kebijakan yang baik, tetapi juga sosok pemimpin yang dapat menjadi panutan dalam bersikap dan berbicara.

Kelima, penggunaan media sosial yang bijak. Pejabat publik harus memahami bahwa media sosial memiliki pengaruh besar dan dapat menjadi alat komunikasi yang efektif jika digunakan dengan tepat.

Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tidak akan terbangun jika komunikasi publik masih bersifat "menclamenle" atau tidak konsisten. Pemerintah perlu memahami bahwa komunikasi yang baik bukan hanya soal berbicara, tetapi juga tentang bagaimana mendengarkan dan merespons kebutuhan serta aspirasi masyarakat. Dengan komunikasi yang lebih baik, kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat semakin meningkat. (\*)

\*)**Drs Prasetiyo MIKom**, alumni Magister Ilmu Komunikasi Unsoed, dan kini sedang menempuh pendidikan di S3 Ilmu Pertanian Unsoed, Purwokerto.

## Pojok KR

Kementerian Perhubungan tetap menyelenggarakan program Mudik Gratis 2025.

- Itu wajib.

\*\*\*

Universitas Islam Indonesia mendesak pemerintah membuka ruang demokrasi lebih luas.

- Sekarang masih sempit?

\*\*\*

DPR RI setuju adanya evaluasi pimpinan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

- Tetap dihormati!

Berabe